

ANALISIS FRAMING KECURANGAN PEMILU FILM DOKUMENTER DIRTY VOTE MODEL WILLIAM A. GAMSON DAN ANDRE MODIGLIANI

¹Gede Ramaditya S.S. , ²Merry Fridha Tri Palupi, ³Beta Puspitaning Ayodya

^{1,2,3} Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

gedegea15@gmail.com

Abstract

*The documentary, "Dirty Vote" sparks an in-depth discussion about the importance of transparency in the political system. By showing the strengths and weaknesses of this genre, this film becomes a mirror for society to question the power held by those who are mandated to represent the interests of the people. The abuse of power that is clearly visible in order to win the election which actually damages the democratic order. Including the spotlight on the great power behind the candidate pair Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming who are said to have committed the most fraud. The research approach used by this study, the Documentary Film "Dirty Vote" is qualitative and the presentation is descriptive. The type of research used in this study is analysis, framing the Gamson and Modigliani models. Framing Analysis of Election Fraud in the Documentary Film *Dirty Vote* The documentary film *Dirty Vote* discusses fraud in elections, especially the phenomenon of dirty votes, with the aim of revealing and analyzing how it occurs and its impact on democracy. Through framing analysis, we can identify how the film shapes the audience's perception of the causes of fraud, moral judgments about dirty votes, proposed solutions, and how this phenomenon is perceived as organized fraud or a systemic problem. The documentary "Dirty Vote" depicts fraud that occurred to a very large extent in the 2024 general election in Indonesia. Through 3 experts in state law, this film shows various ways to manipulate what is suspected to have occurred. This fraud is presented in stages through unethical actions by public officials, government funds used to favor a particular candidate pair, organizing institutions such as the KPU and BAWASLU which are less competent in carrying out their duties as organizers, and the involvement of the Constitutional Court as a cover or "master plan" in the 2024 election fraud plan.*

Keywords: Dirty Vote, Election Fraud , Framing Analysis

Abstrak

Film dokumenter, "Dirty Vote" memicu diskusi yang mendalam tentang pentingnya transparansi dalam sistem politik. Dengan memperlihatkan kekuatan dan kelemahan genre ini, film ini menjadi cermin bagi masyarakat untuk mempertanyakan kekuasaan yang dipegang oleh mereka yang diberi mandat untuk mewakili kepentingan rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat nyata demi memenangkan pemilu yang justru merusak tatanan demokrasi. Termasuk sorotan pada kekuatan besar di balik pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang disebut-sebut paling banyak melakukan kecurangan. Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh penelitian ini Film Dokumenter "Dirty Vote" adalah kualitatif dan penyajiannya bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

analisis, framing model Gamson dan Modigliani. Analisa Framing Kecurangan Pemilu dalam Film Dokumenter *Dirty Vote* Film dokumenter *Dirty Vote* membahas kecurangan dalam pemilu, terutama fenomena suara kotor, dengan tujuan mengungkap dan menganalisis bagaimana hal tersebut terjadi serta dampaknya terhadap demokrasi. Melalui analisis framing, kita dapat mengidentifikasi cara film ini membentuk persepsi penonton tentang penyebab kecurangan, penilaian moral terhadap dirty vote, solusi yang diusulkan, dan cara bagaimana fenomena ini dipersepsikan sebagai kecurangan terorganisir atau masalah sistemik. Film dokumenter "Dirty Vote" menggambarkan kecurangan yang terjadi hingga sangat besar dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia. Melalui 3 pakar ahli tata hukum negara inilah, film ini menampilkan berbagai cara untuk memanipulasi yang diduga terjadi. Kecurangan ini disajikan bertahap melalui tindakan yang tidak etis pada pejabat-pejabat publik, dana pemerintahan yang digunakan untuk memihak pada suatu pasangan calon tertentu, lembaga penyelenggaraan seperti KPU dan BAWASLU yang kurang berkompeten dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara, serta keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai penutup atau "master plan" dalam rencana kecurangan pemilu 2024 ini.

Kata kunci: Dirty Vote, Kecurangan Pemilu, Analisis Framing

Pendahuluan

Film dokumenter "Dirty Vote" membuka diskusi penting tentang transparansi dalam politik. Film ini menunjukkan kekuatan dan kelemahan genre dokumenter, mendorong masyarakat untuk mempertanyakan kekuasaan wakil rakyat. Film ini menyampaikan berbagai pesan seperti pendidikan dan informasi, meskipun ada kritik bahwa film ini terlalu sensasional dan merusak kepercayaan masyarakat pada institusi politik. Hal ini dapat menciptakan skeptisisme berlebihan dan mengurangi partisipasi politik. Manusia dalam situasi ini memiliki kepentingan pribadi dan komunitas (Bagas Asmoro & Dwi Anggoro, n.d.).

Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara menghadirkan pandangan dari tiga pakar hukum, exposing kemunafikan demokrasi borjuis yang mampu menyoroti praktik korupsi dan manipulatif. ((Karl Marx Dan Friedrich Engels_ Manifesto Partai Komunis (1848), n.d.) bahwa demokrasi borjuis "dalam praktiknya selalu tetap menjadi demokrasi untuk kelompok minoritas, hanya untuk kelas berpunya, hanya untuk kaum kaya." Ada juga yang khawatir bahwa film ini tidak memberikan gambaran seimbang tentang situasi politik. Diskusi yang muncul memberi gambaran tentang moralitas dan transparansi dalam politik modern serta peran media dalam membentuk pandangan publik. Menurut (Eriyanto, 2002), frame mengacu pada skema pemahaman individu yang memungkinkan seseorang untuk menempatkan, memersepsi, mengidentifikasi, dan memberi label peristiwa sesuai dengan pemahaman mereka.

Film juga mencerminkan kemajuan film Indonesia dengan berbagai genre. Film dokumenter, yang merekam peristiwa nyata, telah berkembang dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, berkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian Saiful Mujani Research and Consulting, masyarakat memiliki minat besar untuk menonton film. Framing dalam film berfungsi untuk mengemas berita agar sesuai dengan kepentingan media. Menurut Sobur (Mahyani Br Hasibuan et al., n.d.) Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

Proses produksi film dokumenter harus mengikuti prinsip 5W+1H. Film ini berdampak kuat saat dirilis, terutama di masa tenang, mengajak orang untuk berpikir lebih dalam tentang

kecurangan pemilu dan dinamika kekuasaan politik. Banyak skandal menyertai pemilu yang bisa dilihat di dalam film. Fokus "Dirty Vote" pada pasangan calon 02 juga dimanfaatkan untuk melawan rival politik. Salah satu model frame Analisis framing, teori William A. Gamson, menghubungkan media dengan pendapat umum. Gamson percaya bahwa wacana media adalah bagian penting dari pemahaman dan pemahaman pendapat umum tentang suatu masalah atau peristiwa (Eriyanto, 2002). Seperti menurut Vincent Mosco (Hasan, n.d.) bahwa komodifikasi mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa yang dilihat dari kegunaannya kemudian bertransformasi menjadi komoditi yang bernilai jual pasar.

Konsep komodifikasi menunjukkan bagaimana barang dan jasa berubah menjadi komoditi. Dalam demokrasi borjuis, dibahas bahwa partisipasi dalam pemilu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Dalam realitasnya, uang sering menentukan hasil pemilu. Film "Dirty Vote" mengungkapkan bagaimana politisi menghindari hukum pemilu dan melakukan penyuapan. Konsep analisis framing yang dijelaskan (Moh. Dey Prayogo, n.d.) mengungkapkan bahwa pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (story telling) media atas peristiwa, juga secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) yang dibingkai oleh media.

Ada tanda-tanda politik transaksional antara elite politik yang terlihat dalam hasil suara. Penunjukan pejabat oleh Presiden Jokowi sebagai strategi politik sering dianggap tidak sesuai aturan. Observasi menunjukkan pola pemerintahan yang mirip dengan Orde Baru. Para pengamat khawatir tentang masa depan pemerintahan dengan "parlemen semu". Menurut (Eriyanto, 2002), frame mengacu pada skema pemahaman individu yang memungkinkan seseorang untuk menempatkan, memersepsi, mengidentifikasi, dan memberi label peristiwa sesuai dengan pemahaman mereka.

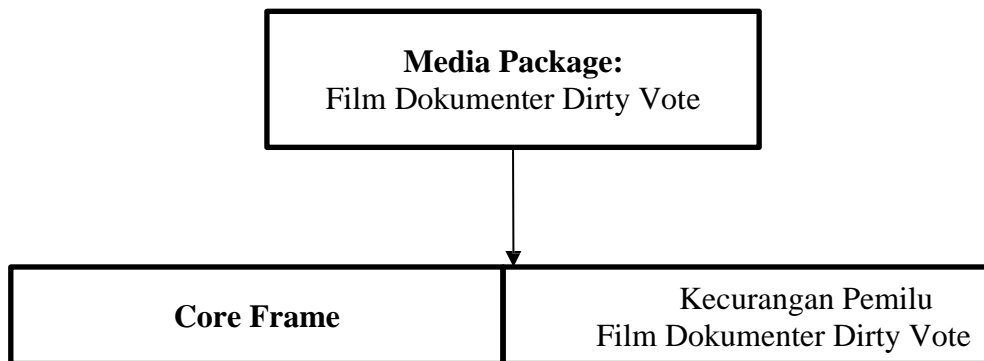
Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh penelitian ini Film Dokumenter "*Dirty Vote*" adalah kualitatif dan penyajiannya bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini banyak digunakan untuk mengkaji dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Studi kualitatif dan deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan atau mengkonstruksi hasil wawancara secara rinci dengan objek penelitian (Kriyanto, 2009).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis teks media, *framing* model Gamson dan Modigliani. Analisis teks media merupakan analisis yang dilakukan untuk memahami isi (konten) yang terkandung dalam teks media, menganalisis semua bentuk yang ada baik cetak maupun visual (Bungin, 2008). Objek penelitian ini yaitu Film Dokumenter *Dirty Vote* yang diunggah pada kanal YouTube Dirty Vote pada tahun 2024. Subjek penelitian ini adalah film dokumenter Dirty Vote yang diunggah di kanal YouTube Dirty Vote tahun 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri berbagai macam diantaranya wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, *focus group discussion*, dan studi kasus. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan adalah Observasi dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *framing* model Gamson dan Modigliani. Teknik keabsahan data untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknis uji keabsahan data Ketekunan Pengamatan dan Menggunakan Referensi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam proses mengkaji penelitian ini, peneliti menyusun kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah penelitian. Dari ilustrasi kerangka penelitian tersebut fokus kajian dalam penelitian ini adalah framing kecurangan pemilu 2024 dalam Film “*Dirty Vote*”



Film dokumenter ini menayangkan suatu realitas berdasarkan fakta objektif serta tanpa rekayasa yang memiliki suatu nilai penting dan mendasar mengenai kehidupan (Rikarno, 2015). Film yang menampilkan tiga pakar hukum tata negara Indonesia, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar yang berbagi pandangan dan analisis mereka tentang isu kecurangan dalam konteks pemilu, tayang pada 11 Februari 2024 melalui saluran YouTube bernama *Dirty Vote* dengan durasi 1:57:22. Berikut ini pembagian segmen pada film “*Dirty Vote*”.

Analisis Framing Kecurangan Pemilu dalam Film Dokumenter **Dirty Vote** Film dokumenter **Dirty Vote** membahas kecurangan dalam pemilu, terutama fenomena suara kotor, dengan tujuan mengungkap dan menganalisis bagaimana hal tersebut terjadi serta dampaknya terhadap demokrasi. Melalui analisis framing, kita dapat mengidentifikasi cara film ini membentuk persepsi penonton tentang penyebab kecurangan, penilaian moral terhadap dirty vote, solusi yang diusulkan, dan cara bagaimana fenomena ini dipersepsikan sebagai kecurangan terorganisir atau masalah sistemik.

Penyebab kecurangan pemilu, bagi film ini, bisa dijelaskan sebagai hasil kelalaian administratif atau tindakan sengaja dari aktor politik. Penilaian moral dirty vote juga dapat dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap demokrasi atau masalah teknis yang bisa diselesaikan. Solusi yang diusulkan oleh film ini, apakah reformasi sistem pemilu, penguatan pengawasan, atau penegakan hukum, akan memengaruhi cara penonton melihat upaya untuk memperbaiki sistem. Elemen framing dalam film, seperti penyajian visual, testimoni, penggunaan bahasa, dan konflik politik, akan membentuk persepsi penonton tentang dirty vote. Apakah sebagai kecurangan terorganisir yang direncanakan atau masalah sistemik yang disebabkan oleh kekurangan dalam sistem pemilu. Framing ini akan mempengaruhi bagaimana publik memandang kecurangan pemilu dan kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi. Dengan pemilihan framing yang tepat, film ini dapat memperkuat kesadaran tentang pentingnya integritas pemilu dan membangun kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Membingkai dirty vote sebagai masalah sistemik atau kecurangan terorganisir dapat membantu penonton memahami solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini serta tindakan yang harus diambil dalam konteks politik yang lebih luas. Analisis framing dalam film dokumenter **Dirty*

Vote* membantu kita memahami bagaimana kecurangan pemilu dipandang dan dipahami secara luas oleh masyarakat.

Film dokumenter *Dirty Vote* merupakan format film bergenre dokumenter dan di rilis pada tanggal 11 Februari 2024 dan telah disaksikan sebanyak 6.437.376 orang. Film ini adalah dokumenter yang mengungkap berbagai bentuk kecurangan sepanjang pemilu dengan menggandeng tiga ahli tata hukum negara. Film dokumenter yang berdurasi 1 jam 57 menit ini dapat menjadi media komunikasi edukasi menjelang pemilu kepada masyarakat agar mampu melihat lebih dalam dan mendapatkan sudut pandang yang lain di samping sekedar memberikan hak suara.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun sehingga mungkin untuk membuat kesimpulan dan tindakan (Subadi, 2006). Penyajian data ini berbentuk teks naratif. Jadi penyajian data ialah proses yang dilakukan setelah pengumpulan data yang kemudian diurutkan dan dianalisis dengan uraian kata-kata. Dalam penelitian kecurangan pemilu 2024 Analisis Framing Film Dokumenter "*Dirty Vote*" Data dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis sehingga bisa diambil kesimpulan.

Beberapa kategori yang masuk dalam kecurangan pemilu *dirty vote* dan transparansi dalam sistem politik digambarkan dalam beberapa adegan, seperti merusak kepercayaan masyarakat pada institusi politik, serta bagaimana para politisi dapat menghindari undang-undang pemilu dan menyuap pejabat KPU dan Bawaslu, serta Pemungutan suara kotor mengungkap penunjukan pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat sebagai sumber kecurangan pemilu. Berikut ini penyajian data pada penelitian mengenai kecurangan pemilu 2024 pada film dokumenter *Dirty Vote* pada kanal *YouTube Dirty Vote*.

Hasil dokumentasi dan observasi pada film dokumenter *Dirty Vote*. Subjek melakukan tindakan sosial yang dapat dimaknai bahwa menekankan penyampaian *Dirty Vote* adalah pengungkapan Kecurangan Pemilu di Indonesia yang dirangkum menjadi beberapa poin sehingga pesan komunikasi dalam film tersebut dapat tersampaikan kepada penontonnya dengan visualisasi yang baik. Hal ini merupakan **Core Frame** yang mana dapat dilihat dari beberapa **Frame Devices** dan **Reasoning Devices** yang ada dalam film ini baik dalam ungkapan verbal maupun non-verbal


Pembingkaian (<i>Framing Devices</i>) Elemen dalam film dokumenter yang digunakan untuk mendukung penggambaran suatu konteks atau isu yang diangkat. Dalam kasus ini mengenai kecurangan dalam proses menjelang pemilu 2024 pada film "Dirty Vote", dimana kecurangan dibingkai sebagai suatu strategi sistematis dan merupakan ancaman serius dalam memproses demokrasi.	Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>) Elemen dalam film dokumenter yang membantu memahami dan mengatasi suatu konteks atau isu yang diangkat. Dalam hal ini, mengenai kecurangan dalam proses menjelang pemilu 2024 pada film "Dirty Vote", kecurangan dibingkai sebagaimana perbuatan yang tidak bermoral dan tidak boleh ditinggal diam, serta kecurangan memiliki dampak signifikan terhadap proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Komponen Perangkat Pembangkaian (<i>Framing Devices</i>)	Komponen Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)

<p><i>Metaphor</i>, yakni pengandaian atau perumpamaan. Dalam film “Dirty Vote” kecurangan pemilu dianalogikan layaknya sedang bermain catur, sehingga kecurangan sebagai pembentukan strategi yang sistematis. Strategi yang sudah diatur sedemikian rupa akan berjalan apabila melibatkan pihak-pihak berkuasa.</p>	<p><i>Roots</i>, yakni analisis kausal sebab akibat. Dalam film “Dirty Vote”, adanya kecurangan menjelang perayaan pemilu 2024 menyebabkan rusaknya keindahan demokrasi serta menimbulkan kekecewaan dan turunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat menjadi terhadap pemerintahan yang ada saat ini.</p>
<p><i>Exemplars</i>, yakni berupa uraian yang menghubungkan pembingkai dengan contoh yang konkret. Contoh ini dapat berupa perbandingan untuk mempertebal dan memperkuat sudut pandang mengenai isu yang sedang dibingkai. Dalam film “Dirty Vote” memperlihatkan bahwa kecurangan dibingkai sebagai suatu hal yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan aturan yang ada dengan merubah atau memanipulasi aturan yang berlaku. Dengan melakukan perbandingan terhadap suatu aturan yang seharusnya diterapkan dengan kenyataan yang ada.</p>	<p><i>Consequences</i>, yakni konsekuensi dari isu yang dibingkai. Dalam film “Dirty Vote”, kecurangan menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses menjelang perayaan pemilu serta dapat membuat publik mengambil sebuah tindakan seperti protes, demo, melakukan penuntutan.</p>
<p><i>Catchphrases</i>, yakni ungkapan yang menarik perhatian, kontras serta mencolok melalui suatu dialog. Lazimnya berupa slogan atau jargon. Dalam film “Dirty Vote” terdapat beberapa kalimat slogan seperti “pemilu kita sedang tidak baik-baik saja” dan “menyusun dan menjalankan</p>	<p><i>Appeal to Principle</i>, yakni klaim moral yang dapat diambil dari isu yang diangkat. Dalam film “Dirty Vote”, pesan yang dapat diambil bahwa sebagai masyarakat Indonesia perlu memperhatikan dan peduli mengenai</p>
<p>skenario kotor ini tak perlu kecerdasan dan juga kepintaran. Yang diperlukan dua yaitu mental culas dan tahan malu”. Kedua ungkapan itu menunjukkan bahwasannya kecurangan yang dilakukan dirangkai dan dibingkai sedemikian rupa sebagai suatu tindakan tidak bermoral yang menjadi ancaman serius bagi demokrasi.</p>	<p>bagaimana proses menjelang pemilu berjalan, serta dapat dengan jeli melihat indikasi-indikasi kecurangan yang dapat merusak tatanan proses demokrasi. Sehingga proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan hadirnya pemimpin terbaik bagi bangsa ini.</p>

<p><i>Depiction</i>, yakni penggambaran suatu isu yang menggunakan kata, kalimat, atau istilah yang bermakna konotatif. Dalam film “Dirty Vote”, kecurangan pemilu dibingkai sebagai manipulasi dan pelanggaran terhadap hukum, serta lemahnya sistem politik. Selain itu, kecurangan sebagai tindakan yang menghalangi lahirnya pemimpin</p>	
<p><i>Visual Image</i>, yakni penggunaan gambar, foto, tabel, atau visualisasi lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan isu dengan lebih jelas. Dalam film “Dirty Vote” terdapat beberapa gambar/foto/tabel, sebagai berikut</p>	

Framing Devices	
<p>Metaphors</p> <p><i>Pengandaian atau perumpamaan</i></p>	<p>Simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam film dokumenter “<i>Dirty Vote</i>” mendukung pemikiran sutradara. Simbol-simbol ini menunjukkan peristiwa yang ingin ditampilkan sutradara. Untuk menekankan arti ikon dan membantu khalayak memahaminya, simbol digunakan. Selanjutnya, itu dapat memberikan pemahaman tentang kecurangan pemilu film dokumenter <i>Dirty Vote</i>. Di sini, penggunaan framing device lebih menekankan cara melihat masalah.</p> <p>Perangkat pembingkai ini biasanya digunakan untuk memberi label atau gambar tertentu tentang kecurangan pemilu yang tersebar. Sutradara sering menggunakan perangkat pembingkai ini untuk beberapa tujuan dalam pencitraan kecurangan pemilu film <i>Dirty Vote</i>. Beberapa</p>

	elemen, seperti metaphors, exemplars, catchphrases, depictions, dan visual images, mendukung perangkat pembingkai ini
Exemplars <i>Pelengkap untuk menguatkan bingkai</i>	- Tujuan penggunaan contoh di sini adalah untuk melengkapi bingkai inti dalam kesatuan isi film untuk membenarkan perspektif. Contoh yang ditunjukkan menunjukkan hubungan antara kecurangan pemilu <i>Dirty Vote</i> dalam film ini menggunakan dokumen kekuatan data yang disampaikan. Adegan penyampaian data dimana Jika kita simak betapa pentingnya soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara. kita bisa melihat Pulau Jawa..
Catchphrases <i>Berupajargon atau slogan</i>	- Film ini menggambarkan gambaran kecurangan sebagaimana suatu ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. Kecurangan tersebut dibingkai melalui faktor utama yang membuat proses demokrasi menjelang perayaan pesta pemilu berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya. Seperti kegagalan tersebut dimulai dengan Bantuan Sosial (BanSos) yang digunakan untuk alat politik demi meraup suara, penunjukan PJ Kepala Daerah yang wewenangnya dapat digunakan untuk kepentingan politik, pejabat publik yang tidak nertal serta kurangnya kompeten dari BAWASLU dan KPU.
Depictions <i>Label yang digunakan dalam sebuah isu</i>	- Penggunaan <i>Depiction</i> , pada film dokumenter “Dirty Vote” disebutkan bahwasannya media massa nasional mengatakan Gibran “anak haram demokrasi” (1:22:18). Citra yang terbnngun pada Gibran hadir melalui hal-hal kontroversial yang

	<p>berhubungan dengan dirinya. Dalam dokumenter ini, Gibran menjadi puncak dari kecurangan pemilu 2024 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diubah hanya untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden.</p>
<p>Visual Image</p> <p><i>Perangkat pendukung berupa gambar atau citra untuk menekankan pesan</i></p>	 <p>- Adegan penyampaian data dimana Jika kita simak betapa pentingnya soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara. kita bisa melihat Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi penduduk terbesar. Mereka memiliki 115 juta suara pemilih. Sayangnya, kalau dilihat sebaran, mereka hanya memiliki 6 provinsi. Bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat di Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau yang sangat menentukan sebaran wilayah, memiliki 10 provinsi dan sangat menentukan sebaran wilayah tersebut. Mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan 7 provinsi berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di 3 provinsi.</p>
<p>Roots</p> <p><i>Analisis kausal atau sebab akibat</i></p>	<p>- Penggunaan <i>Roots</i> pada menit 1:39:27 – 1:39:42 ditemui dialog yang mengatakan “Gibran diperbolehkan mencalonan, saya sedikit marah dan sampai mengatakan saya gugat anda nanti karena anda mengganggu mimpi saya soal betapa indahnya demokrasi di Indonesia sekarang setelah terbangun</p>

	<p>rasa-rasanya demokrasi menjadi buruk”. Kecurangan pemilu 2024 sebagai suatu hal yang merusak tatanan demokrasi yang awalnya indah menjadi buruk. Kecurangan digambarkan memberikan dampak yakni masyarakat menjadi kecewa terhadap kenyataan demokrasi di Indonesia yang tidak sesuai harapan mereka serta turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada saat ini.</p>
<p>Appeal to Principle</p> <p><i>Merupakan pemikiran, prinsip, dan klaim moral</i></p>	<p>- Diperlukan kepedulian dari masyarakat agar proses demokrasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan baik, dengan “buka mata” terhadap indikasi-indikasi kecurangan yang dapat merusak pemilu sebagai bagian terpenting dari demokrasi. Sebab dengan kepedulian masyarakat mengenai hal ini, maka akan menjadi penentu nantinya hadir pemimpin baru terbaik bagi bangsa ini.</p>
<p>Consequences</p> <p><i>Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai</i></p>	<p>- <i>Framing</i> mengenai kecurangan suatu hal “luar biasa” dan “tidak bisa dianggap baik-baik saja” dapat merusak kepercayaan publik dalam proses pemilu/demokrasi yang sedang berjalan, hal ini dapat menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap yang sedang berjalan, hal ini dapat menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, lalu <i>framing</i> kecurangan yang dilakukan politisi “mempermainkan publik pemilih” dan “memenangkan kepentingan mereka” dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap politisi maupun instansi politik. Kemudian, <i>framing</i> kecurangan sebagai suatu hal yang “tidak boleh didiamkan” dapat membuat publik</p>

	mengambil sebuah tindakan seperti protes, demo, melakukan penuntutan.
--	-----------------------------------------------------------------------

Penutup

Film dokumenter “Dirty Vote” menggambarkan kecurangan yang terjadi hingga sangat besar dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia. Melalui 3 pakar ahli tata hukum negara inilah, film ini menampilkan berbagai cara untuk memanipulasi yang diduga terjadi. Kecurangan ini disajikan bertahap melalui tindakan yang tidak etis pada pejabat- pejabat publik, dana pemerintahan yang digunakan untuk memihak pada suatu pasangan calon tertentu, lembaga penyelenggaraan seperti KPU dan BAWASLU yang kurang berkompeten dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara, serta keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai penutup atau “*master plan*” dalam rencana kecurangan pemilu 2024 ini.

Daftar Pustaka

- Bagas Asmoro, F., & Dwi Anggoro, A. (n.d.). ANALISIS FRAMING STIGMA GEMBLAK PADA FILM DOKUMENTER FORMAT LAMA. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), x, No. x, 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.xxxx>
- Beta Puspitaning Ayodya. (n.d.). ANALISIS FRAMING TENTANG GAYA HIDUP HEDON POLISI DI KOMPAS.COM DAN DETIK.COM EDISI 07-08 SEPTEMBER 2023.
- <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom>
- Eriyanto. (2002). pdf-eriyanto-2012-analisis-framing-konstruksi-ideologi-dan-politik-media-pdf_compress.
- Fortunato, J. A., & Martin, S. E. (2016). The Intersection of Agenda-Setting, the Media Environment, and Election Campaign Laws. Journal of Information Policy, 6, 129–153. <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.6.2016.0129>
- Fridha, M., Palupi, T., Irawan, R. E., Bina, U., Jakarta, N., Syahdan No, J. H., Jakbar, P., & Id, M. C. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan sebagai Dampak Covid 19 di Kompas.com dan Malaysiakini. In Jurnal Representamen (Vol. 6, Issue 02).
- Griffin, E. M., Ledbetter, A., & Sparks, G. (n.d.). A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY TENTH EDITION.
- Hasan, K. (n.d.). KAJIAN EKONOMI POLITIK MEDIA (Hiperealitas Ruang Politik Publik). Ilmiah, J., & Grafis, K. (2020). FILM DOKUMENTER SEBAGAI MEDIA INFORMASI KOMPETENSI KEAHLIAN SMK NEGERI 11 SEMARANG. 13(2), 123–132.
- Karl Marx dan Friedrich Engels_ Manifesto Partai Komunis (1848). (n.d.).
- Mahyani Br Hasibuan, R., Syahadah Sinaga, N., & Rahmadina, A. (n.d.). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial.
- Moh. Dey Prayogo. (n.d.). artikel-dey MAKNA RADIKALISME DALAM LINGKARAN FRAMING MEDIAMORFOSIS, POLITIS, DAN IDEOLOGIS
- Yanti, E., Program, R., Komunikasi, S., Islam, P., Dakwah, F., & Komunikasi, D. (2018).

Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi Theory of Setting Agenda in Communication Science. SIMBOLIKA, 4(1). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>
Zulhifitri, D., & Hidayat, O. (n.d.). Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 PERSAMAAN HAK ASASI MANUSIA DAN RASISME PADA KELOMPOK MINORITAS (ANALISIS FRAMING DALAM FILM THE GREATEST SHOWMAN).